

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 15 wilayah kabupaten dan dua wilayah perkotaan. Setiap kabupaten dan setiap daerah perkotaan mempunyai pemerintahan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah melibatkan keterlibatan gubernur, bupati atau walikota, dan pegawai negeri sipil daerah.

Di bidang pelayanan dan penguatan serta pembangunan, pemerintah telah mengambil langkah nyata dalam melaksanakan kebijakan nasional untuk mencapai terwujudnya masyarakat maju yang mandiri. Sejalan pernyataan Nugroho (2000) bahwa “tanpa kapasitas ekonomi, tidak ada daerah yang mampu mempertahankan dirinya, bahkan dengan dukungan politik, organisasi, dan sumber daya manusia”.

Dari pemberitaan SuaraSulsel.id, Pemda Konawe Selatan sudah berencana membentuk kabupaten baru bernama Konawe Timur, terpisah dari Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) yang ada di Sulawesi Tenggara. Ridwanshah Taridala, Ketua Pemekaran Kabupaten Konawe Timur, dalam pertemuan itu menyatakan, pendiriannya sudah berlangsung sejak 2014, namun masih terganjal pengaruh pemerintah pusat. “Semua dokumen dan persyaratan sudah lengkap dan tinggal menunggu pemerintah pusat mencabut penangguhan pelaksanaan daerah otonom baru (DOB),” ujarnya, Jumat (29 Juli 2022).

Berdasarkan keterangannya, pemetaan dan pengelolaan kawasan tersebut telah selesai dilakukan. Usulan tersebut menyerukan pembentukan 12 kecamatan. Ketika Kabupaten Konawe Timur ditetapkan sebagai daerah otonom baru (DOB) di Sulawesi Tenggara, Konda diusulkan menjadi ibu kota daerah ini. Pasalnya, letaknya di antara Mowila dan Laonti dinilai strategis karena kedua wilayah itu merupakan kawasan paling terpencil.

Sejumlah pusat perkantoran rencananya akan dibangun di Kecamatan Moramo Utara yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan

(Konsel) Konawe Timur akan memiliki 12 kecamatan – mulai dari Laonti, Wolasi, Landonu, Mowila Sabulakoa, Kolono, Kolono Timur, Moramo, Moramo Utara, Konda, Ranomeeto, dan Ranomeeto Barat. Wilayah Konda dan Moramo Utara berfungsi sebagai ibu kota dan pusat administrasi bupati.

Terkait dengan isu pemekaran Konawe Timur yang beredar pada masyarakat dan pemerintah setempat khususnya provinsi Sulawesi Tenggara, Pemekaran ini tentu akan berdampak pada sebagian pegawai pemerintahan yang ada sekarang akan beralih di Kabupaten Konawe Timur

Kedepannya akan dibuka kantor baru di Kabupaten Konawe Timur. Salah satu yang sangat kita perlukan adalah kantor Bupati Konawe Timur. Kantor Bupati merupakan tempat pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah kabupaten yang pada akhirnya akan menjadi kantor administratif Bupati dan Wakil Bupati. Fokus penekanan desain perancangan kantor Bupati Konawe Timur mengambil Gaya arsitektur berbasis neo vernakular dengan menonjolkan unsur lokal Kabupaten Konawe Timur. Gaya neo-vernakular diharapkan mampu menonjolkan karakter kedaerahan dan ciri-ciri yang tampak modern tanpa mengurangi nilai arsitektur daerah yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi pertimbangan pada proses desain Kantor Bupati Konawe Timur dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merencanakan gedung Kantor Bupati Konawe Timur yang bisa dirancang untuk menampung segala jenis kegiatan ?
2. Bagaimana strategi penerapan konsep Arsitektur Neo Vernakular pada perancangan gedung Kantor Bupati Konawe Timur ?

1.3 Tujuan Perancangan

1. Rencana pembangunan gedung Kabupaten Konawe Timur yang mampu menampung berbagai macam kegiatan, baik pelayanan maupun kegiatan pemerintahan.
2. Menerapkan konsep pendekatan arsitektur neo-vernakular pada Gedung Kantor Bupati Konawe Timur.
3. Penentuan lokasi, penentuan tapak, dan analisa penyelesaian tapak

Gedung Kantor Bupati Konawe Timur.

1.4 Manfaat Rancangan

Manfaat yang ingin dicapai dari perancangan ini diharapkan dapat mewujudkan desain Kantor Bupati Konawe Timur yang memiliki karakteristik dengan mengekspresikan karakteristik daerah secara modern dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Selain itu, terdapat daerah-daerah dimana layanan publik yang lebih baik dapat diberikan, seperti sektor jasa dan gedung-gedung pemerintah daerah, dengan harapan akan adanya pembangunan struktur pemerintahan baru di masa depan. Diharapkan dengan memperbaiki kerangka pembangunan ekonomi lokal berbasis potensi lokal dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk lokal.

1.5 Lingkup Perancangan dan Batasan Rancangan

1. Lingkup Perancangan

Secara khusus focus desain perancangan ini membahas tentang perencanaan dan perancangan arsitektur, dengan penekanan khusus pada usulan Kantor Bupati Konawe Timur. Rencana tersebut mempertimbangkan aspek dan faktor lain di luar disiplin ilmu yang ditentukan, namun tidak ditekankan dalam pembahasan, tergantung situasi dan permasalahan.

2. Batasan Rancangan

Batasan utama pada desain Kantor Bupati Konawe Timur adalah pada tahap perancangan bangunan harus disesuaikan dengan fungsinya dan pertimbangan tapak harus sejalan dengan ilmu desain. Gedung Kantor Bupati Konawe Timur didesain dengan tata ruang dan fasilitas pendukung kantor Bupati Konawe Timur.

1.6 Metode Dan Sistematika Perancangan

1. Metode Perancangan

Pendekatan ini mengambil langkah demi langkah. Mulai dari pengumpulan data dan teori hingga studi lapangan terhadap objek yang relevan, sehingga memungkinkan adanya pemahaman yang komprehensif.

Informasi yang diperoleh pada tahap sebelumnya akan diperiksa dan diolah. Tahapan tersebut pada akhirnya digunakan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam perancangan Kantor Bupati Konawe Timur.

2. Sistematika Perancangan

BAB I PENDAHULUAN

Memberikan rincian tentang masalah, sifat dan tujuannya, ruang lingkup dan batasan masalah, termasuk informasi latar belakang mengenai metode dan sistem argumen.

BAB II KAJIAN OBYEK RANCANGAN

Makna judul dirangkum di sini, memberikan gambaran tentang konfigurasi spasial dan pola hubungan, serta prinsip dasar pemikiran desain dan perencanaan.

BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR

Bagian khusus memberikan gambaran umum rencana proyek, dengan fokus pada kondisi lokasi atau tapak, pelaku dan kegiatan, proyeksi kebutuhan ruang, dan pendekatan konsep desain.

BAB IV ANALISA ARSITEKTUR

Bagian ini menjelaskan awal pendekatan, termasuk fungsi dan estetika, perencanaan bangunan, sistem utilitas, prinsip desain, dan alternatif desain di lokasi.

BAB V KONSEP ARSITEKTUR

Konsep arsitektur mencakup konsep desain dasar yang konsisten dengan studi tentang komposisi massa, penataan ruang, dan penggunaan material dalam suatu bangunan. Perancangan bangunan disertai dengan gambar detail yang menjelaskan utilitas dan strukturnya, serta gambar konstruksinya.

BAB VI VISUALISASI RANCANGAN

Visualisasi rancangan membahas tentang cara mengkomunikasikan ide dan konsep desain menggunakan elemen visual. Ini melibatkan penggunaan gambar, sketsa, diagram, render, atau model tiga dimensi untuk

mewujudkan desain secara visual. Visualisasi rancangan bertujuan untuk memperjelas dan mengkomunikasikan gagasan-gagasan desain kepada Pembaca yang melihatnya.